

The Implementation of Zoning Policy in the Student Admission System (PPDB) and Its Impact on Public Satisfaction at SMA Negeri 01 Cisarua, Bogor Regency

Zahra Yeza Sabilla^{1*}, Ginung Pratidina², Dede Syahrudin³
Universitas Djuanda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Corresponding Author: Zahra Yeza Sabilla zahrasabilla66@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords : Policy Implementation, Zoning, SPMB, Public Satisfaction, Education

Received : 20 February 2026

Revised : 25 March 2026

Accepted: 28 April 2026

©2026 Sabilla, Pratidina, Syahrudin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the zoning policy in the New Student Admission System (SPMB) and its impact on public satisfaction. The methodology used is descriptive qualitative, utilizing an approach derived from the policy implementation theory proposed by George C. Edward III. Data collection was conducted through interviews, observations, and document collection. The findings of this study indicate that the policy implementation is quite effective, but challenges remain in terms of resources and public understanding. The level of public satisfaction is considered quite good, although improvements are still needed in terms of socialization and clarity of information.

Implementasi Kebijakan Zonasi Sistem Penerimaan Murid Baru (PPDB) Terhadap Kepuasan Masyarakat di SMA Negeri 01 Cisarua Kabupaten Bogor

Zahra Yeza Sabilla^{1*}, Ginung Pratidina², Dede Syahrudin³

Universitas Djuanda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Corresponding Author: Zahra Yeza Sabilla zahrasabilla66@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Zonasi, SPMB, Kepuasan Masyarakat, Pendidikan

Received : 20 Februari 2026

Revised : 25 Maret 2026

Accepted: 28 April 2026

©2026 Sabilla, Pratidina, Syahrudin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan zonasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) serta dampaknya terhadap kepuasan masyarakat. Metodologi yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan dari teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan kebijakan cukup efektif, tetapi masih ada tantangan dalam hal sumber daya dan pemahaman masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat dinilai cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam hal sosialisasi dan kejelasan informasi.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, dalam upaya meningkatkan pemerataan akses pendidikan, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya melalui sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antardiswilayah serta memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh peserta didik. Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bermutu (Desi, 2024).

Namun pada kenyataannya, kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi ketimpangan yang cukup besar. Fenomena sekolah “unggulan” membuat masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan anak ke sekolah tertentu sehingga menimbulkan kesenjangan distribusi peserta didik. Sekolah yang dianggap kurang favorit menjadi minim pendaftar, sementara sekolah negeri tertentu mengalami kelebihan kapasitas. Ketimpangan ini mendorong pemerintah menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik

Sejak 2017, zonasi mulai diterapkan melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Sistem ini mengatur bahwa penerimaan peserta didik harus mengutamakan jarak domisili terdekat dengan sekolah sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan. Dalam perkembangannya, PPDB kini berubah menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2025. Meski secara istilah berbeda, tujuan kebijakannya tetap sama, yaitu memastikan pemerataan layanan pendidikan dan menghilangkan diskriminasi dalam penerimaan murid baru. (Karmila & Syakira, n.d.)

Namun di lapangan kebijakan tersebut sering menimbulkan persepsi yang beragam. Masih ditemukan masyarakat yang belum memahami sepenuhnya mekanisme zonasi, terutama terkait ketentuan domisili, jarak tempuh, validasi data, hingga penggunaan sistem online. Selain itu, kesiapan sekolah, kapasitas daya tampung, serta pemahaman masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. SMA Negeri 01 Cisarua Kabupaten Bogor merupakan salah satu sekolah negeri yang banyak diminati. Setiap tahun jumlah pendaftar meningkat signifikan sehingga implementasi zonasi menjadi isu penting yang memengaruhi transparansi, akses, dan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam mengenai bagaimana kebijakan ini diimplementasikan, faktor apa saja yang menjadi kendala, dan bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses SPMB.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Edward III

Pressman dan Wildavsky yang dikutip oleh (E. Halimatu Sa’ diah & Dede Syahrudin, 2024). menyatakan bahwa “Implementasi berarti melakukan, mencapai, memenuhi, menghasilkan, menyesuaikan.” Ini menunjukkan bahwa implementasi merujuk pada proses membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

implementasi adalah penerapan dari gagasan atau rencana yang sudah dirumuskan sebelumnya, dan merupakan sebuah proses yang pada akhirnya menghasilkan output atau hasil akhir yang sesuai dengan gagasan atau rencana tersebut. Pada tahap ini berbagai actor pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat berperan dalam memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai. Model Implementasi George C. Edward III mengemukakan bahwa terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: (Sutmasa, 2021)

Komunikasi

Komunikasi merupakan factor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan public. Kejelasan informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan akan sangat menentukan tingkat pemahaman terhadap kebijakan. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik dapat menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, komunikasi harus dilakukan dengan tepat dan jelas, sehingga para pelaksana dapat memahami dan terapkan dengan baik melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. (Ilmi et al., 2024)

Sumber Daya

Sumber daya adalah factor paling krusial dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif. Strategi terkait sumber daya menjadi sangat vital dalam mencapai keberhasilan implementasi. Unsur utama dalam kebijakan adalah terdiri dari pegawai atau sumber daya manusia secara keseluruhan. Elemen-elemen sumber daya dalam model Edward III yaitu, staf ini menunjukkan keterlibatan sekelompok individu dalam sebuah organisasi yang juga mendukung ketua atau pemimpin di atas mereka, Informasi ini adalah sejenis data yang diperlukan oleh pihak berwenang untuk disajikan kepada penerima sebagai panduan dalam membuat keputusan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, wewenang adalah kesempatan untuk bertindak atau tidak bertindak mengenai pelaksanaan kebijakan program demi mencapai sasaran yang diinginkan, dan yang terakhir fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan harus ada agar pelaksanaan kebijakan publik dapat terwujud (Wini Windia Lestari, Ginung Pratidina, 2024).

Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap pelaksana kebijakan yang harus selaras dan menerima kebijakan tersebut. Disposisi juga bukan hanya berarti mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Pelaksana yang memiliki pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan akan cenderung menjalankan tugasnya dengan lebih baik.

Struktur Birokrasi

Kebijakan publik biasanya bersifat kompleks, sehingga memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. Jika struktur birokrasi tidak mendukung pelaksanaan kebijakan, maka sumber daya tidak akan efektif. Birokrasi salah satu pelaksana kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara

politik dengan melakukan koordinasi yang baik. Faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrat dapat mempengaruhi langsung pelaksanaan kebijakan. Selain itu, faktor tersebut juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan secara tidak langsung melalui dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing faktor. Dengan kata lain, setiap faktor saling mempengaruhi satu sama lain, lalu bersama-sama mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Sistem Zonasi

Berdasarkan pusat dan stastistik pendidikan serta Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Istilah "zonasi" pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017 dalam pengaturan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang merujuk pada regulasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk pendidikan lainnya. Pengertian Zonasi menurut mendikbud yang dikutip oleh (Reinaldo Efraim Silas, Florence. J. D. Lengkong, 2021). Kebijakan ini merupakan hasil penyesuaian dari sistem rayonisasi yang sebelumnya lebih menekankan pada prestasi akademik siswa. Pada sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, aspek utama yang diprioritaskan adalah jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah yang dituju sebagai dasar penentuan seleksi.

Kepuasan Masyarakat

Menurut Kotler (2002) menyatakan bahwa kepuasan muncul sebagai bentuk respons emosional seseorang setelah membandingkan hasil atau kinerja yang diterima dengan harapan yang dimilikinya. Sementara itu, Chaplin (2005) menjelaskan bahwa kepuasan merupakan kondisi menyenangkan atau perasaan sejahtera yang timbul ketika seseorang berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Dalam konteks perilaku konsumen, kepuasan ditunjukkan pada individu atau kelompok terhadap apa yang di konsumsinya yaitu prodak barang atau jasa. (Konstitusi, 2025). Sedangkan Menurut Conseuegra et al. (2007), yang dikutip oleh (Natalia Amba, Saul Ronald Jacob Saleky, 2023) untuk mengukur kepuasan pelanggan dapat menggunakan tiga dimensi, yaitu:

- **Kesesuaian Harapan** menggambarkan sejauh mana produk atau layanan yang diberikan mampu memenuhi ekspektasi pengguna.
- **Presepsi Kerja** merujuk pada penilaian pelanggan terhadap kualitas hasil kerja yang disediakan oleh instansi, apakah sudah dianggap memadai atau masih belum memenuhi standar.
- **Penilaian pelanggan** secara menyeluruh menunjukkan bagaimana pelanggan menilai kualitas layanan yang diterima, apakah lebih baik atau justru kurang dibandingkan dengan layanan dari instansi lain yang menawarkan produk atau jasa sejenis.

METODOLOGI

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dengan cermat implementasi Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB). seleksi informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni penetapan responden secara sengaja berdasarkan kapasitas mereka untuk memberikan informasi yang relevan dengan keperluan studi ini (Lenaini et al., 2021). Melalui metode ini, didapatkan 8 informan yang dianggap sesuai dengan fokus inti pembahasan. Pengumpulan data mencakup informasi primer dan sekunder, sedangkan analisis dilakukan memakai analisis deskriptif. (Sholikhah, 2016)

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian wawancara dengan Kepala Sekolah, Staff Kesiswaan, dan siswa, Implementasi Kebijakan Zonasi SPMB di SMA Negeri 01 Cisarua Kabupaten Bogor dianalisis melalui empat variable utama model Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Hasil analisa menunjukkan

Komunikasi kebijakan zonasi SPMB di SMA Negeri 01 Cisarua sudah dilakukan melalui berbagai media, seperti sosialisasi tatap muka, undangan kepada tokoh masyarakat dan sekolah asal, media sosial (Instagram, website), serta pemasangan banner di lingkungan sekolah. Namun demikian, pemahaman masyarakat terhadap aturan zonasi masih belum merata. Sebagian orang tua tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi dan cenderung mencari informasi hanya ketika proses pendaftaran sudah dimulai. Dengan demikian, komunikasi tersebut sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif, karena pesan yang disampaikan belum diterima secara konsisten oleh seluruh masyarakat.

Sumber daya manusia maupun sarana prasarana di SMA Negeri 01 Cisarua secara umum sudah mendukung pelaksanaan kebijakan zonasi. Guru, tenaga administrasi, dan panitia telah memahami mekanisme pendaftaran sehingga mampu membantu masyarakat yang datang. Fasilitas seperti ruang layanan, komputer, jaringan internet, dan perangkat administratif juga telah disiapkan dengan baik. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam sumber daya sistem, terutama pada server pusat yang sering mengalami gangguan saat pendaftaran dibuka. Dengan demikian, sumber daya internal sekolah sudah memadai, tetapi keterbatasan sistem pusat dan literasi digital masyarakat menjadi hambatan dalam implementasi.

Sikap pelaksana kebijakan di SMA Negeri 01 Cisarua menunjukkan komitmen yang tinggi. Kepala sekolah, panitia SPMB, dan guru bersikap kooperatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Para pelaksana juga berusaha memberikan informasi yang benar, transparan, dan tidak memihak kepada siapapun dalam proses penerimaan. Para pelaksana menegaskan bahwa semua aturan diikuti sesuai petunjuk teknis dari pemerintah provinsi. Tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan atau ketidaksesuaian antara sikap pelaksana dan tujuan kebijakan. Dengan demikian,

disposisi pelaksana termasuk baik, karena petugas menjalankan tugas dengan jujur, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Struktur Birokasi atau struktur organisasi pelaksana SPMB di SMA Negeri 01 Cisarua sudah tertata dengan jelas. Tugas panitia, mekanisme kerja, serta alur pelayanan telah disusun berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku. Prosedur pendaftaran sudah mengikuti ketentuan provinsi mulai dari jalur domisili atau zona, afirmasi, hingga prestasi. Namun demikian, struktur birokrasi yang bergantung pada sistem provinsi membuat sekolah tidak memiliki kewenangan penuh ketika terjadi kendala teknis, seperti gangguan server, error pada website, atau ketidaksesuaian data domisili. Koordinasi dengan pihak provinsi memerlukan waktu, sehingga hal ini dapat menghambat kelancaran proses. Dengan demikian, struktur birokrasi sudah berjalan sesuai aturan, tetapi masih kurang fleksibel karena ketergantungan pada sistem pusat dan kebijakan teknis tingkat provinsi. Lalu tingkat kepuasan masyarakat berada pada kategori cukup baik. Hal ini terlihat dari tiga indikator utama menurut teori Kotler, yaitu kesesuaian harapan, persepsi kinerja, dan penilaian pelanggan.

Pertama, pada indikator kesesuaian harapan, sebagian besar masyarakat merasa bahwa hasil PPDB sudah sesuai dengan harapan mereka. Responden menyatakan bahwa anak mereka diterima di sekolah pilihan utama, serta proses penerimaan berjalan lancar. Informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan alur pengecekan hasil dinilai jelas dan mudah dipahami. Kendala yang muncul hanya bersifat teknis, seperti lambatnya server pada awal pembukaan pendaftaran online. Meskipun demikian, kendala tersebut tidak mengurangi keseluruhan kepuasan masyarakat terhadap hasil akhir.

Kedua, pada indikator persepsi kinerja, masyarakat menilai bahwa sekolah telah memberikan layanan yang baik dalam penyampaian informasi maupun penyediaan sistem pendaftaran. Informasi yang disampaikan melalui grup WhatsApp dan website resmi sekolah dianggap mudah dipahami dan membantu proses pendaftaran. Sistem pendaftaran online dinilai mempermudah masyarakat, meskipun sesekali terjadi error. Secara umum, kinerja sekolah dalam mengelola PPDB dinilai cukup responsif, jelas, dan mendukung kebutuhan masyarakat.

Ketiga, pada indikator penilaian pelanggan, masyarakat dapat menerima hasil akhir PPDB karena proses dinilai transparan dan kriteria seleksi jelas, terutama terkait jarak rumah dalam jalur zonasi. Tidak ditemukan keluhan terkait ketidakadilan ataupun diskriminasi dalam proses seleksi. Masyarakat memberikan masukan agar stabilitas sistem online ditingkatkan sehingga tidak mudah mengalami gangguan saat banyak pengguna mengakses secara bersamaan.

PEMBAHASAN

Keberhasilan implementasi kebijakan zonasi di SMA Negeri 01 Cisarua merupakan hasil kombinasi antara kesiapan internal sekolah dan daya dukung eksternal. Sekolah telah menunjukkan kapasitas yang cukup baik melalui layanan, sikap pelaksana, serta fasilitas yang disediakan. Namun keberhasilan dalam komunikasi dan sumber daya eksternal menjadi tantangan utama karena masih adanya hambatan pada literasi digital masyarakat dan stabilitas sistem provinsi yang belum sepenuhnya optimal. Selain aspek internal, pembahasan juga menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat menjadi cerminan penting dari keberhasilan implementasi kebijakan. Masyarakat menilai layanan panitia cukup membantu, proses pendaftaran relatif jelas, dan pengumuman hasil dilakukan secara transparan tanpa campur tangan pihak tertentu.

Namun sebagian masyarakat masih merasa kebijakan zonasi kurang adil, terutama mereka yang tinggal sedikit lebih jauh dari sekolah tetapi masih berada dalam kecamatan yang sama. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat tentang zonasi sebagai kebijakan pemerataan masih belum sepenuhnya menyeluruh. Persepsi masyarakat bahwa "zonasi harus mengikuti batas administratif kecamatan" sering kali bertentangan dengan kenyataan bahwa perhitungan sistem berbasis jarak digital, bukan batas wilayah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian terkait pelaksanaan kebijakan zonasi pada SPMB di SMA Negeri 01 Cisarua Kabupaten Bogor, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan tersebut sudah berlangsung dengan cukup optimal, meskipun masih terdapat beberapa komponen yang memerlukan peningkatan.

Komunikasi mengenai SPMB telah disebarluaskan melalui berbagai media, seperti sosialisasi tatap muka, platform media sosial, serta situs resmi sekolah. Namun sebagian masyarakat masih belum memahami mekanisme zonasi maupun perubahan istilah PPDB ke SPMB. Artinya, penyebaran informasi belum sepenuhnya merata dan membutuhkan peningkatan kejelasan serta jangkauan sosialisasi.

Sumber Daya pelaksana SPMB memiliki kompetensi yang cukup baik, tetapi sarana pendukung seperti komputer dan kestabilan sistem online masih terbatas. Kendala ini menghambat kelancaran pendaftaran, terutama bagi masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi.

Panitia Pelaksana menunjukkan sikap ramah, responsif, dan berkomitmen menjalankan aturan. Namun saat terjadi gangguan teknis atau lonjakan pendaftar, pelayanan belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan peningkatan kesiapsiagaan.

Struktur Birokrasi pelaksanaan SPMB mengikuti prosedur resmi dengan pembagian tugas yang jelas. Kendala terbesar adalah daya tampung sekolah yang terbatas dibandingkan jumlah pendaftar, sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian masyarakat. Selain itu hasil penelitian Tingkat kepuasan masyarakat secara keseluruhan juga tergolong berada pada kategori yang cukup memadai. Proses seleksi dinilai transparan, namun pemahaman masyarakat terhadap sistem zonasi, kendala teknis, dan keterbatasan daya tampung masih menjadi sumber ketidakpuasan. Dengan demikian, meskipun

kebijakan zonasi telah terlaksana dengan baik, upaya perbaikan tetap diperlukan agar pelaksanaan SPMB di masa mendatang menjadi lebih optimal dan merata.

Adapun rekomendasi yang bisa diberikan supaya sistem PPDB ini berjalan dengan baik lagi yaitu, Pihak sekolah dan dinas pendidikan perlu meningkatkan kualitas sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan zonasi dan mekanisme SPMB. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga perlu memanfaatkan berbagai media digital yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti video tutorial, media sosial, serta panduan tertulis yang disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami secara lebih baik alur dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan kebingungan saat proses pendaftaran.

Perlu memastikan sistem pendaftaran online dapat berjalan dengan stabil. Selain itu, diperlukan juga dukungan dari dinas pendidikan untuk menjaga keandalan server agar tidak mengalami gangguan pada saat proses pendaftaran berlangsung. Dan Kebijakan zonasi perlu terus dievaluasi secara berkala agar dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi tersebut dapat mencakup aspek keadilan dalam penerimaan, efektivitas sistem zonasi, serta dampaknya terhadap kepuasan masyarakat. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan kebijakan zonasi dapat menjadi lebih efektif, adil, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini memiliki ruang pengembangan yang dapat dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah atau membandingkan implementasi kebijakan zonasi di beberapa sekolah negeri sekaligus, sehingga hasilnya memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan SPMB di tingkat daerah. Peneliti berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat secara statistik untuk memperoleh hasil yang lebih terukur dan objektif. Dengan memperluas perspektif penelitian, diharapkan temuan yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi peningkatan kualitas kebijakan penerimaan murid baru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus ditunjukkan kepada SMA Negeri 01 Cisarua Kabupaten Bogor yang telah mengizinkan penelitian ini serta mendukung dalam penyajian data dan melaksanakan wawancara. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pengajar, staf, orang tua murid, siswa yang telah mengluangkan waktu untuk memberikan informasi selama proses pengumpulan data. Tidak kalah pentingnya, penghargaan tertinggi juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing, rekan-rekan peneliti, dan semua pihak yang telah

memberikan arahan, dukungan, serta masukan yang sangat bernilai. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat yang positif dan menjadi rujukan untuk penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Desi, Sri Rhmawati. 2024. "Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Sri Rahmawati Dewi Program Studi Ilmu Administrasi Publik."
- E. Halimatu Sa'diah, Dede Syahrudin. 2024. "Implementasi Program Bogor Career Center (BCC) dalam Memberikan Peluang Masyarakat Kabupaten." *Karimah Tauhid* 3: 13807-12.
- Ilmi, Mirtha, Cindy Dwi Maulidiya, Universitas Negeri Surabaya, and Kota Surabaya. 2024. "Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP di Kota Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP di Kota." 2(5).
- Karim, Navarin, Hendriyaldi Hendriyaldi, and Wahyu Rohayati. 2020. "Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Melalui E-Service Quality di Kota Jambi." *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6(2): 135-50. Doi:10.25299/Jiap.2020.Vol6(2).5964.
- Karmila, Mila, and Niswatu Syakira. "Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru."
- Kemendbud, Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Setjen. "Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan."
- Konstitusi, Mahkamah. 2025. "Laporan Akhir Survei Kepuasan Masyarakat Mahkamah Konstitusi." *Laporan Akhir* (021). <https://www.mkri.id/>.
- Reinaldo Efraim Silas, Florence. J. D. Lengkong, Alden Laloma. 2021. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Zonasi Pendidikan Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sd Negeri 2 Sopai Toraja Utara Reinaldo." *Issn Vii*(102).
- Rena Marshella. 2023. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat SMP Negeri di Kabupaten Karimun." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 1(3): 161-78. Doi:10.59581/Doktrin.V1i3.1030.
- Sholikhah, Amiroton. 2016. "St A Tistik Deskriptif A Tif Amiroton Sholikhah." 10(2): 342-62.
- Wini Windia Lestari, Ginung Pratidina, Faisal Tri Ramdani. 2024. "Implementasi Kebijakan Program Kampung Ramah Lingkungan." *Karimah Tauhid* 3: 7689-7704.